

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Secara esensial, kinerja perusahaan adalah tentang seberapa baik perusahaan berhasil mencapai apa yang telah ditargetkan, dengan memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien (Rospondani, 2021). Pemahaman kinerja ini tidak hanya terbatas pada output atau hasil akhir semata, melainkan juga mencakup keseluruhan proses pencapaiannya, di mana efektivitas operasional, yang antara lain didukung oleh implementasi proses pengambilan keputusan yang sistematis, terstruktur, dan berbasis data yang akurat, menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan berkelanjutan (Kusumasari et al., 2024). Kinerja menjadi cerminan kesuksesan perusahaan secara komprehensif dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia dengan optimal dan tepat guna untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan. Dengan demikian, kinerja dapat diartikan sebagai komparasi antara capaian nyata yang berhasil diraih dengan standar atau rencana yang sebelumnya telah diformulasikan.

Pengukuran kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Tanpa adanya mekanisme pengukuran yang sistematis, akan sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk menjalankan manajemen yang efektif. Fungsi pengukuran kinerja hadir sebagai instrumen esensial untuk meraih dan mengendalikan berbagai sasaran strategis, menyediakan informasi balik yang

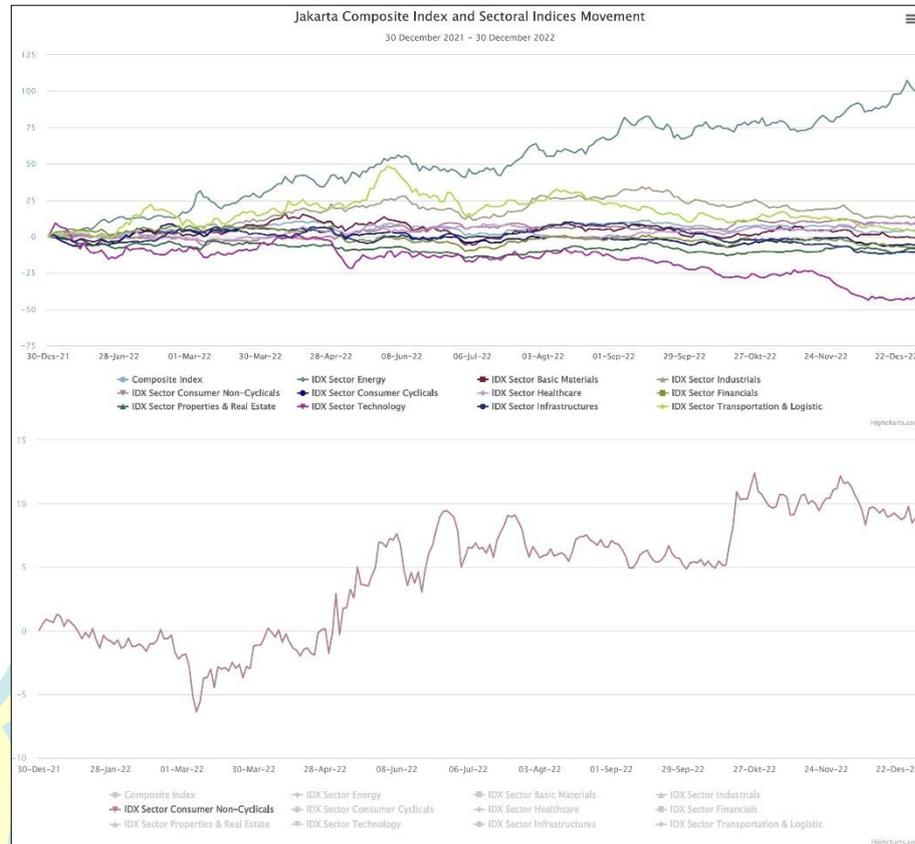
berharga untuk proses pengambilan keputusan, peningkatan mutu berkelanjutan, serta pertanggungjawaban organisasi. Melalui proses pengukuran kinerja ini, organisasi dapat mendefinisikan dengan jelas parameter-parameter hasil yang diharapkan dari setiap program, investasi, dan kegiatan akuisisi yang dijalankan. (Damayanti et al., 2023)

Persaingan bisnis yang semakin kompetitif menghadirkan tantangan signifikan terhadap kinerja perusahaan di berbagai sektor. Di Indonesia, intensitas dinamika ini diperkuat oleh meningkatnya keterbukaan ekonomi, integrasi ke dalam pasar global, serta akselerasi perkembangan teknologi digital. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk melakukan inovasi berkelanjutan dalam produk, layanan, dan model bisnis, meningkatkan efisiensi operasional melalui optimalisasi rantai pasok dan adopsi teknologi, serta secara proaktif memperluas pangsa pasar melalui strategi pemasaran yang efektif dan penetrasi pasar baru (Pratama et al., 2024). Kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan eksternal, termasuk regulasi pemerintah, preferensi konsumen yang dinamis, dan disrupsi teknologi, menjadi fondasi krusial bagi keberlangsungan dan pertumbuhan usaha (Safiri, 2025).

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan serius terkait penyimpangan kinerja perusahaan, yang tercermin dari berbagai kasus manipulasi laporan keuangan, khususnya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kasus PT Jiwasraya yang terungkap pada tahun 2018-2019 menyoroti praktik manipulatif yang berlangsung selama bertahun-tahun melalui *window dressing* dan investasi berisiko tinggi, hingga menyebabkan kerugian negara belasan triliun rupiah

(Lumbanrau, 2019). Sementara itu pada tahun 2018, diwaktu yang bersamaan PT Garuda Indonesia juga terbukti melakukan pemalsuan laporan keuangan, dengan modus pengakuan pendapatan fiktif dan rekayasa neraca keuangan (Mubtasir, 2025). Praktik penyimpangan semacam ini tidak hanya merusak integritas laporan keuangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk menurunnya kepercayaan publik, terganggunya operasional bisnis, dan melemahnya posisi keuangan jangka panjang.

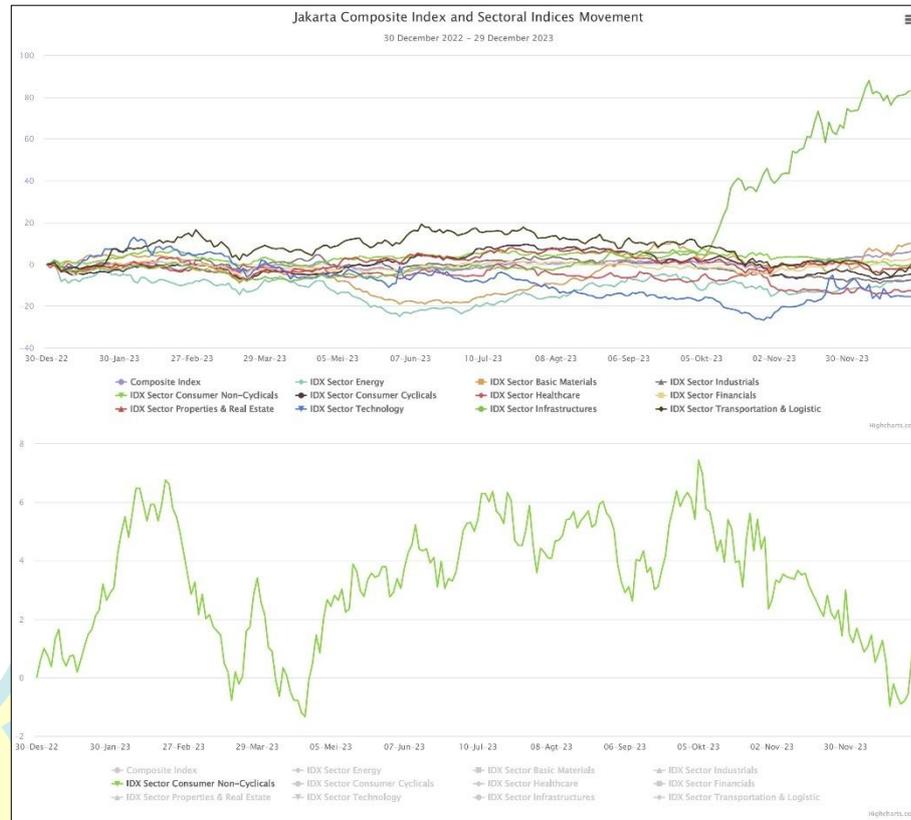
Pada tahun 2022, pasar modal Indonesia menunjukkan kinerja perusahaan berbagai sektoral yang sangat beragam meskipun IHSG secara keseluruhan tumbuh positif. Sektor energi, industri, dan bahan baku melonjak signifikan, sementara sektor teknologi anjlok tajam. Di tengah divergensi ini, sektor barang konsumen non-siklikal menampilkan dinamika yang menarik dan berbeda. Setelah melalui fase tekanan dan kinerja di bawah rata-rata pasar pada paruh pertama tahun, sektor ini menunjukkan resiliensi dengan melakukan pemulihan yang kuat dan berkelanjutan pada paruh kedua, puncaknya berhasil membalikkan keadaan dan mengungguli IHSG menjelang penutupan tahun. Performa ini tidak hanya menandakan kemampuan adaptasi yang tinggi dari sektor tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, tetapi juga mencerminkan adanya perbaikan sentimen pasar dan penguatan fundamental yang kembali menarik minat investor, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Pergerakan Indeks Sektor Tahun 2022

Sumber: Bursa Efek Indonesia yang Diakses oleh Peneliti, 2025

Hal ini berlanjut hingga pada akhir periode 2023, yang mana sektor barang konsumen non-siklikal menunjukkan karakteristik pasar yang sangat dinamis dan volatil. Investor di sektor ini mengalami fluktuasi nilai investasi yang cukup besar. Meskipun ada peluang kenaikan yang signifikan dalam jangka pendek hingga menengah, risiko koreksi yang tajam juga sama besarnya. Kinerja akhir yang mendekati titik impas (*breakeven*) setelah setahun penuh volatilitas menandakan tidak adanya tren bullish atau bearish yang berkelanjutan untuk keseluruhan periode tersebut, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 2 Pergerakan Indeks Sektor Tahun 2023

Sumber: Bursa Efek Indonesia yang Diakses oleh Peneliti, 2025

Sektor konsumen non-siklikal memiliki karakter defensif yang kuat dan memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan konsumsi domestik. Karakter ini lahir dari fundamental sederhana, yang menyediakan produk-produk esensial yang permintaannya tidak elastis terhadap fluktuasi pendapatan masyarakat. Di saat kondisi ekonomi sedang menurun, konsumen mungkin menunda pembelian barang mewah, tetapi mereka akan tetap membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan sektor ini. Stabilitas permintaan inilah yang secara langsung tercermin pada kinerja perusahaan di dalamnya, yang mampu mempertahankan pendapatan dan margin keuntungan berkat permintaan produk esensial yang stabil. Dari sisi pendapatan, perusahaan-perusahaan ini cenderung menikmati aliran kas yang lebih dapat diprediksi karena volume penjualan yang konsisten. Lebih penting lagi,

mereka sering kali memiliki kekuatan harga (*pricing power*) yang memungkinkan mereka untuk melindungi margin keuntungan. Ketika biaya bahan baku atau logistik meningkat akibat inflasi, perusahaan dapat secara bertahap menaikkan harga jualnya tanpa kehilangan pelanggan secara signifikan, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki sektor lain.

Namun, di tengah tekanan persaingan yang ketat, perusahaan juga terdorong untuk mengeksplorasi strategi alternatif yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dan memperkuat posisi pasar mereka. Salah satu strategi yang menarik perhatian dalam konteks ekonomi politik adalah pembentukan dan pemanfaatan koneksi politik. Perusahaan dengan koneksi politik merupakan entitas yang menjalin hubungan khusus dengan pemerintah, baik melalui individu seperti politisi dan pejabat tinggi maupun melalui institusi pemerintahan. Koneksi ini terjadi ketika pejabat tinggi negara atau anggota partai politik memiliki peran strategis dalam perusahaan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai pemegang saham mayoritas, yang memberikan mereka kendali signifikan terhadap arah dan kebijakan perusahaan (Junus et al. (2022); Faccio (2006)).

Di Indonesia, fenomena koneksi politik kerap terlihat di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak era Presiden Soeharto hingga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, pengangkatan dan pergantian komisaris BUMN sering melibatkan individu dengan afiliasi politik tertentu (Mahendra & Cheisviyanny, 2024). Jabatan strategis seperti komisaris BUMN tidak jarang diisi oleh relawan pendukung pemerintah, anggota partai politik, atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Menurut Prof Dr Rahmat Setiawan SE MM, fenomena koneksi politik tidak hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melainkan telah meluas di lingkup perusahaan swasta di Indonesia. Dalam pemaparan orasinya, beliau menegaskan bahwa "Sekitar 75 persen perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki koneksi politik demi menjamin kelancaran bisnisnya" (Aziizah, 2024). Sebagaimana terlihat juga pada perusahaan konglomerat seperti Bakrie Group, CT Group, dan MNC Group yang telah membangun jaringan politik strategis melalui figur-figur utamanya yaitu Aburizal Bakrie, Chairul Tanjung, dan Hary Tanoesoedibjo, yang secara aktif terlibat dan memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan politik nasional. Hal ini mencerminkan bahwa keterkaitan antara politik dan struktur organisasi perusahaan telah menjadi praktik yang lazim di Indonesia.

Koneksi antara sektor bisnis dan politik menunjukkan interaksi yang signifikan dan kerap digunakan untuk mendapatkan privilese tertentu, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mempertahankan keberlangsungan perusahaan di tengah dinamika peraturan. Hubungan ini diyakini memberikan berbagai keuntungan strategis bagi perusahaan, seperti memperoleh berbagai hak istimewa, termasuk kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dan pengurangan risiko pemeriksaan pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing di pasar (Lusiana & Sri, 2023). Koneksi semacam ini sering kali dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat (D. Pratiwi & Hariyati, 2024). Studi empiris mengindikasikan bahwa entitas bisnis dengan jaringan politik yang kuat

memiliki peluang lebih besar untuk menikmati berbagai keuntungan yang timbul dari relasi politik tersebut (Annisa & Lastanti, 2025).

Pranoto & Widagdo (2016) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik adalah perusahaan yang memiliki ikatan atau mengusahakan kedekatan dengan pemerintah atau politisi melalui cara-cara tertentu. Keterkaitan yang kompleks antara aktivitas politik dan kondisi ekonomi diketahui sangat memengaruhi indikator ekonomi (Sudjono et al., 2023). Pernyataan ini didukung oleh pendapat Coulomb dan Sangnier (2014) dalam Joseline et al. (2021) yang menyatakan bahwa sebagian besar aktivitas politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian. Kebijakan politik yang diterapkan tentunya juga akan memengaruhi berbagai sektor, mulai dari regulasi bisnis hingga kesejahteraan masyarakat secara luas.

Koneksi politik yang dikembangkan oleh suatu entitas bisnis memiliki karakteristik yang menyerupai dua sisi mata pedang. Di satu sisi, jaringan politik dapat menghasilkan manfaat dan keuntungan strategis bagi kinerja perusahaan, sementara di sisi lain, koneksi tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan hasil beragam terkait pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan. Dari sisi positif, penelitian oleh Idris et al. (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik yang baik dianggap mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, Maaloul et al. (2018) juga berpendapat bahwa investasi pada perusahaan berkoneksi politik juga dapat memberikan manfaat bagi investor, terutama bagi pemegang saham minoritas. Hal ini

menunjukkan bahwa kontrol oleh partai politik, atau pemerintah dapat menjadi platform atau syarat penting bagi eksekutif yang memiliki koneksi politik untuk dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Ding et al., 2014).

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh D. Pratiwi & Hariyati (2024) menyimpulkan bahwa koneksi politik yang awalnya dapat dipandang sebagai sumber daya eksternal yang berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan, hal ini bisa menjadi masalah jika individu yang memiliki latar belakang politik ditempatkan dalam posisi strategis tanpa kompetensi yang memadai. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian Azizah & Amin (2020) yang menyatakan perusahaan yang memiliki koneksi politik sering mengeluarkan biaya besar untuk pendanaan dan perizinan guna mempermudah kontrak atau memenangkan tender proyek pemerintah, yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas dan kinerja perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, koneksi politik dapat merusak reputasi perusahaan, menghambat transparansi, serta mengancam keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (U. Rahmawati et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara memanfaatkan koneksi politik dan tetap menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) guna memastikan kinerja yang berkelanjutan dan etis.

Konsep *corporate governance* muncul sebagai respons terhadap adanya teori keagenan, yang menggambarkan situasi ketika kepemilikan sebuah entitas bisnis berdiri terpisah dari struktur pengelolaannya. Seperti yang diungkapkan oleh D. Pratiwi & Hariyati (2024), pemisahan fungsi ini menciptakan peluang bagi timbulnya konflik kepentingan yang terjadi antara para pemilik perusahaan dan

pihak manajemen yang menjalankan operasional perusahaan. Tanpa tata kelola perusahaan yang baik, intervensi politik yang berlebihan atau penyalahgunaan wewenang dapat menciptakan distorsi pasar, memicu praktik korupsi, melumpuhkan persaingan yang sehat, dan juga dapat menyebabkan kegagalan tata kelola dalam sistem penegakan hukum (Motsepe & Matakalatse, 2025).

Poza (2010) dalam V. Rahmawati & Cahyani (2024) menyatakan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga yang sama atau sejumlah kecil keluarga dengan cara yang berpotensi berkelanjutan lintas generasi dalam keluarga tersebut. Penambahan elemen keberlanjutan lintas generasi ini menjadi ciri khas yang sering diasosiasikan dengan perusahaan keluarga, membedakannya dari bisnis yang dimiliki keluarga namun tanpa intensi untuk diwariskan. Senada dengan itu, Zellweger (2017) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai "bisnis dengan kontrol keluarga yang dominan dan visi untuk mempertahankan kontrol keluarga lintas generasi".

Menurut Prastia & Hasanah (2022), struktur kepemilikan keluarga — yang merupakan pola kepemilikan di mana suatu keluarga memegang porsi saham signifikan dalam perusahaan — telah menjadi fenomena yang umum dan tersebar luas di berbagai negara. Fenomena ini terutama menonjol di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dengan statistik menunjukkan bahwa sekitar 68% dari total perusahaan publik global memiliki karakteristik kepemilikan keluarga. Dalam konteks Indonesia, rata-rata besaran kepemilikan saham oleh keluarga mencapai 20%, proporsi yang dipandang cukup substansial untuk memberikan kewenangan bagi pihak keluarga dalam mempengaruhi dan menentukan arah

kebijakan serta kinerja perusahaan (Prastia & Hasanah, 2022). Fenomena ini mencerminkan karakteristik unik dari struktur bisnis di Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan tradisional, di mana ikatan keluarga sering menjadi fondasi utama dalam pengembangan usaha.

Kegagalan tata kelola dan konflik internal dalam perusahaan keluarga menjadi tantangan serius yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlangsungan bisnis. Kasus Sinar Mas Group pada tahun 2019 yang masih berlanjut hingga saat ini menunjukkan bagaimana konflik antara kepentingan bisnis dan keluarga, komunikasi yang buruk antar anggota keluarga, serta ketidakjelasan struktur manajemen dapat menimbulkan ketegangan yang berdampak pada stabilitas operasional. Sengketa warisan, dominasi figur sentral, dan isu nepotisme memperburuk dinamika internal, mencerminkan lemahnya tata kelola dalam menghadapi kompleksitas hubungan keluarga. Di sisi lain, sengketa hukum antara Gudang Garam dan Gudang Baru pada tahun 2021 lalu menyoroti pentingnya perlindungan aset tidak berwujud seperti merek dagang dalam bisnis keluarga. Meskipun berhasil dimenangkan oleh Gudang Garam, kasus ini menunjukkan bahwa konflik semacam itu dapat berlangsung lama dan merusak reputasi apabila tidak dikelola secara tepat. Kedua kasus tersebut mencerminkan pentingnya tata kelola yang kuat dalam perusahaan keluarga guna menjaga integritas internal, kestabilan bisnis, dan keberlanjutan jangka panjang.

Prastia & Hasanah (2022) menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh anggota keluarga sendiri memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, mengindikasikan bahwa kontrol keluarga cenderung menghasilkan

performa yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan. Namun, Ivan & Raharja (2021), dan Halim & Suhartono (2021) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dari kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja perusahaan, karena rendahnya kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan menyebabkan minimnya pengaruh keluarga terhadap kinerja perusahaan, juga kepentingan pribadi keluarga yang lebih diutamakan daripada kepentingan investor. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Uliyah et al. (2023) yang berpendapat bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, dimana semakin tinggi kepemilikan keluarga maka semakin rendah kinerja suatu perusahaan.

Menurut Fadillah (2017), perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* memerlukan suatu entitas atau kelompok yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan yang diambil oleh direksi. Dalam konteks ini, dewan komisaris independen merupakan elemen fundamental dari mekanisme *good corporate governance*. Dewan komisaris independen memiliki peran strategis dalam mengarahkan strategi dan melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan, serta memastikan bahwa jajaran manajemen benar-benar bekerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Semakin besar proporsi komisaris independent yang ada di perusahaan, dapat memberikan peningkatan dalam hal pengawasan, mengontrol dan juga mengendalikan pihak manajemen untuk mencegah melakukan praktik yang tidak diinginkan pada Perusahaan tersebut (Liliana & Karina, 2025).

Deretan kasus tahun 2018 hingga tahun 2019 pada PT Garuda Indonesia, juga PT Jiwasraya, hingga pada tahun lampau 2005 pada PT KAI dapat menunjukkan contoh permasalahan lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), terutama dalam hal pengawasan internal dan eksternal. Peran penting pengawas independen seperti komisaris di PT KAI menjadi sorotan, terutama ketika pengawasan eksternal seperti auditor justru gagal menjalankan fungsinya. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mengevaluasi efektivitas GCG dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan, terutama di sektor BUMN yang memiliki beban kepercayaan publik tinggi.

Dewan komisaris independen hadir menjadi inti dari praktik *corporate governance* yang diberi mandat untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan secara konsisten dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga bertugas mengawasi pihak manajemen dalam mengelola perusahaan dan memastikan terlaksananya prinsip akuntabilitas dalam setiap aktivitas operasional (Liliana & Karina, 2025). Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris independen menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan mendorong tercapainya kinerja perusahaan yang optimal (Hendrianto, 2022).

Namun, studi-studi terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Putra (2015), Idris et al. (2020) dan Yuliyanti & Cahyonowati (2023) dalam temuannya mengindikasikan bahwa keberadaan dewan direksi independen memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang mana setiap kenaikan proporsi dewan direksi independen

yang kompeten, serta memiliki koneksi politik dapat meningkatkan kinerja dan memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan. Namun bertolak belakang dengan hasil tersebut, studi yang dilakukan oleh D. Pratiwi & Hariyati (2024), V. A. Pratiwi & Noegroho (2022) dan Fadillah (2017) justru menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, di mana peningkatan proporsi dewan komisaris independen cenderung mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan secara keseluruhan, dan dinilai kurang kompeten dalam menilai yang mengakibatkan keputusan lebih dominan diambil oleh dewan komisaris.

Inkonsistensi temuan dari berbagai penelitian terdahulu pada topik hubungan koneksi politik, kepemilikan keluarga, dewan komisaris independen, dan kinerja perusahaan, telah mendorong minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada topik yang sama. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Keluarga, dan dewan komisaris independen terhadap Kinerja Perusahaan".

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian penelitian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor konsumen non siklikal?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja Perusahaan pada perusahaan sektor konsumen non siklikal?

3. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja Perusahaan pada perusahaan sektor konsumen non siklikal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini dibuat dengan tujuan:

1. Menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor konsumen non siklikal.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor konsumen non siklikal.
3. Menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor konsumen non siklikal.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut, antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan bukti empiris mengenai peranan koneksi politik, kepemilikan keluarga, dan dewan komisaris independen dalam proses pengambilan keputusan kinerja perusahaan.
- b. Menambah referensi dan konfirmasi atas teori keagenan, serta dapat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk penelitian selanjutnya terkait dengan kinerja perusahaan.

- c. Adanya pembuktian atas gap penelitian yang terdapat pada penelitian terdahulu mengenai peran koneksi politik, kepemilikan keluarga, dan dewan komisaris independen kepada kinerja perusahaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi (Mahasiswa)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai koneksi politik, kepemilikan keluarga, dewan komisaris independen dan kinerja perusahaan, serta menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.

- b. Bagi Praktisi (Investor)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam menilai kinerja dan pengambilan keputusan investasi pada perusahaan.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dalam perusahaan yang memiliki koneksi politik, sehingga dapat dikembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

- d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menilai dan mengawasi kinerja pada perusahaan sektor konsumen non siklikal.

- e. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mendukung manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, khususnya pada perusahaan yang memiliki keterkaitan politik dan/atau didominasi oleh kepemilikan keluarga.